

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam dinamika politik suatu masyarakat. Melalui partisipasi politik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat, maka segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara keseluruhan akan dapat di wujudkan. Keterlibatan seseorang, baik secara pribadi maupun dalam kelompok, dianggap sebagai faktor krusial dalam mewujudkan kepentingan umum. Fokus utama dalam hal ini adalah sikap dan perilaku masyarakat dalam berbagai aktivitas politik yang ada (Setiadi and Kolip 2013).

Partisipasi politik dikategorikan dalam beberapa bentuk dan derajat, seperti yang dikemukakan oleh Almond dan Verba dalam (v. M. buyanov 1967), berikut merupakan bentuk-bentuk partisipasi politik:

1) Voting (Pemberian Suara)

Hal ini merupakan bentuk partisipasi yang paling umum dan memiliki ruang lingkup yang luas, berfungsi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

2) Kegiatan Kolektif

Kegiatan ini termasuk kedalam kegiatan informal atau gerakan sosial yang menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih aktif.

3) Kontak Langsung

Hal ini merupakan keterlibatan dalam urusan personal yang memiliki derajat partisipasi yang lebih rendah.

4) Aktivitas Protes

Bentuk partisipasi yang lebih ekspresif dan sering dilakukan untuk mengekspresikan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan tertentu.

Sidney Verba dan Norman H. Nie dalam (Mujani, Liddle, and Ambardi 2012), mengungkapkan, partisipasi politik adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu dengan tujuan mempengaruhi keputusan seseorang yang menduduki jabatan pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, yang dikembangkan oleh Sidney Verba dan Norman H. Nie dalam bukunya yang berjudul *Participation in America: Political Democracy and Social Equality* (Kostroski 1974). Berikut merupakan faktor-faktor yang mereka identifikasi:

1) Sumber Daya (Resource)

Partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh akses individu terhadap sumber daya, termasuk waktu, uang dan keterampilan. Individu yang

memiliki lebih banyak sumber daya cenderung lebih aktif dalam kegiatan politik.

2) Keterlibatan Psikologis (Psychological Engagement)

Faktor keterlibatan psikologis ini mencakup minat dan kesadaran politik, serta rasa memiliki terhadap komunitas politik. Orang yang lebih tertarik dalam terlibat secara psikologis dalam politik cenderung lebih sering berpartisipasi.

3) Aksesibilitas Jaringan Sosial (Social Networks)

Jaringan sosial, seperti keluarga, teman dan organisasi dapat mempengaruhi partisipasi politik seseorang. Jaringan ini berfungsi sebagai sumber informasi dan dorongan untuk terlibat dalam kegiatan politik.

4) Mobilisasi (Mobilization)

Partisipasi politik juga dipengaruhi oleh upaya mobilisasi dari partai politik, kelompok kepentingan, atau organisasi lainnya yang mengajak individu untuk terlibat dalam kegiatan politik.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pilihan rasional untuk memahami bagaimana uang atau barang yang ditawarkan dalam praktik *money politics* mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula. Menurut teori pilihan rasional, partisipasi politik merupakan fungsi dari biaya dan manfaat yang terkait dengan tindakan politik (Ouattara and Steenvoorden 2023). Teori pilihan rasional

dalam konteks pengaruh *money politics* terhadap partisipasi politik pemilih pemula berfokus pada analisis biaya dan manfaat dari partisipasi politik. Menurut teori pilihan rasional, pemilih pemula mungkin cenderung lebih memilih kandidat yang menawarkan kompensasi finansial, karena ini merupakan keuntungan langsung yang dapat mereka rasakan (Ouattara and Steenvoorden 2023). Teori pilihan rasional ini membantu menjelaskan bagaimana *money politics* berperan dalam meningkatkan atau mengurangi partisipasi politik, tergantung bagaimana pemilih merepresikan hal tersebut.

Mengacu pada pandangan Teori Pilihan Rasional dari Coleman, dengan unsur utama yakni aktor dan sumber daya, terdapat korelasi yang signifikan dalam memotivasi individu untuk memenuhi hasrat politiknya (Sastrawati 2019). Mengacu pada teori partisipasi politik Sidney Verba, partisipasi politik dipandang sebagai kegiatan yang dilakukan individu untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, yang dikembangkan oleh Sidney Verba dan Norman H. Nie dalam bukunya yang berjudul *Participation in America: Political Democracy and Social Equality* yaitu: sumber daya, keterlibatan psikologis, aksesibilitas jaringan sosial, dan mobilisasi. Dalam konteks teori pilihan rasional, faktor sumber daya, seperti uang atau barang yang ditawarkan dalam praktik *money politics*, dapat menjadi insentif penting yang memengaruhi keputusan pemilih untuk berpartisipasi dalam politik. Ketika pemilih memandang manfaat material dari *money politics* sebagai keuntungan langsung yang dapat diperoleh, hal ini sejalan dengan teori rasional, di mana keputusan partisipasi didasarkan pada

kalkulasi biaya dan manfaat. Oleh karena itu, dengan menggabungkan perspektif teori pilihan rasional dan teori partisipasi politik Verba, dapat dipahami bahwa *money politics* tidak hanya memengaruhi motivasi, tetapi juga bagaimana pemilih memanfaatkan sumber daya untuk mendukung tindakan politik mereka. Selain itu, kognisi pemilih mengenai seberapa besar sumber daya tersebut mampu memenuhi kebutuhan mereka juga menjadi faktor kunci dalam menentukan seberapa aktif mereka terlibat dalam proses politik (Verba, Schlozman, and Brady 2000).

Sosialisasi politik keluarga juga menjadi fokus dari penelitian, dalam penelitian ini pengaruh sosialisasi politik keluarga terhadap partisipasi politik pemilih pemula menekankan pentingnya peran keluarga dalam proses sosialisasi politik. Proses sosialisasi politik mengacu pada cara berbagai lembaga dalam lingkungan mempengaruhi sikap dan perilaku politik mereka di masa depan. Komunikasi antara individu dan agen sosialisasi diidentifikasi sebagai elemen kunci dalam transfer pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma, dan kompetensi yang mendukung kewarganegaraan aktif setelah masa kanak-kanak. Keluarga dianggap sebagai lembaga sosialisasi pertama yang berperan dalam pembentukan sikap politik anak-anak (Easton, 1957; King dan marelman, 1986; Galles, 1995) dalam (M. V. Esau, Rondganger, and Roman 2019).

Keluarga, sebagai unit sosial utama, berperan penting dalam proses sosialisasi politik pemilih pemula. Dalam konteks ini, sosialisasi politik keluarga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyampaian nilai-nilai politik, arahan, atau bahkan tekanan untuk mendukung pilihan politik tertentu. Pemilih pemula yang masih membantun identitas politik mereka cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh

pandangan dan sikap politik orang tua atau anggota keluarga lainnya. Keluarga dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang berharga, menyediakan wawasan dan perspektif yang mempengaruhi bagaimana pemilih pemula memahami isu-isu politik dan memutuskan untuk berpartisipasi. Selain itu, sosialisasi politik keluarga juga dapat berperan sebagai dorongan atau hambatan dalam partisipasi politik pemilih pemula. Jika keluarga aktif secara politik dan mendorong keterlibatan dalam kegiatan politik, pemilih pemula mungkin merasa termotivasi untuk ikut serta dalam proses politik. Sebaliknya, jika keluarga kurang mendukung atau bahkan menghambat keterlibatan politik, hal ini dapat mengurangi tingkat partisipasi politik pemilih pemula.

Agen sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang politik, sekaligus berperan dalam memobilisasi mereka dengan mempengaruhi, mendorong, atau menghambat preferensi dan aktivitas politik mereka. Para peneliti menyoroti peran penting keluarga sebagai salah satu agen sosialisasi utama dalam menanamkan orientasi politik dasar (Dalton, 1980; Jennings dan Niemi, 1968, 1981; Jennings, Stoker, dan Bowers, 2009). Pengaruh orang tua dianggap sangat penting, terutama dalam membentuk identifikasi partai (Taylor, Peplau, dan Sears, 1994; Campbell et al., 1960; Jennings dan Niemi, 1974; Kroh dan Selb, 2009), ideologi politik (Percheron dan Jennings, 1981), serta partisipasi politik (Beck dan Jennings, 1982; Verba, Scholzman, dan Burns, 2005) dalam (Neundorff and Smets 2016).

Sosialisasi politik keluarga memiliki keterkaitan yang erat dengan aksesibilitas jaringan sosial, yang juga menjadi salah satu faktor penting dalam

partisipasi politik menurut Sidney Verba. Jaringan sosial, seperti keluarga, teman dan organisasi dapat mempengaruhi partisipasi politik seseorang. Jaringan ini berfungsi sebagai sumber informasi dan dorongan untuk terlibat dalam kegiatan politik (Kostroski 1974).

Dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pemilu, jaringan sosial keluarga tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga berfungsi sebagai media transfer nilai-nilai politik yang relevan. Dorongan yang muncul dari interaksi sosial dalam keluarga dapat memotivasi pemilu untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik. Selain keluarga, pengaruh dari teman atau kelompok sosial lainnya juga memberikan kontribusi penting dalam memperluas wawasan politik dan mendorong individu untuk terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas politik. Dengan demikian, jaringan sosial berperan sebagai katalis yang memperkuat proses sosialisasi politik, sekaligus memobilisasi individu untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam proses politik.

2.2 Money Politics

Politik uang atau yang biasa diterjemahkan sebagai *money politics* adalah praktik yang melibatkan pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu yang bernilai, seperti uang atau barang kepada pemilu atau kelompok tertentu dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilu. Praktik ini sering kali dilakukan oleh kandidat atau partai politik untuk memperoleh dukungan atau memenangkan suara dalam pemilihan, baik itu dalam pemilihan legislatif, eksekutif, maupun pemilihan kepala daerah. Praktik ini merupakan salah satu

bentuk kecurangan umum dan dianggap sebagai ancaman serius terhadap integritas demokrasi. Meskipun pemilihan umum seharusnya menjadi proses yang adil dan transparan di mana pemilih memilih berdasarkan visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh kandidat atau partai politik, politik uang merusak proses ini dengan mengubah suara menjadi komoditas yang dapat dibeli dan dijual.

Aspinall dan Sukmajati dalam (Stange 2017) mendefinisikan *money politics* sebagai praktik yang melibatkan pemberian uang, barang, atau layanan kepada pemilih atau aktor politik lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Mereka menekankan bahwa *money politics* tidak hanya melibatkan transaksi langsung antara kandidat dan pemilih, tetapi juga dapat mencakup berbagai bentuk kompensasi yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk mendapatkan dukungan politik. Mereka mengungkapkan, *money politics* adalah strategi yang digunakan oleh banyak aktor politik di Indonesia untuk memastikan kemenangan dalam pemilu, yang sering kali dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan.

Johny Lomulus dalam karyanya “Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Lampung di Kota Bitung dalam Demokrasi Mati Suri” menjelaskan bahwa *money politics* adalah tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat sebagai partisipasi politik memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut (Johny 2007).

Menurut pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, *money politics* adalah upaya untuk mempengaruhi massa pemilih dengan imbalan materi, seperti uang atau barang, untuk memenangkan pilihan. Yusril Ihza menekankan bahwa praktik ini dapat dikategorikan sebagai penyuapan, yang jika terbukti pelakunya bisa dijerat dengan pasal tindak pidana. Namun, jika pelaku tidak teridentifikasi, proses hukum sering kali menjadi sulit untuk dilanjutkan.

Dari berbagai definisi dan perspektif di atas, *money politics* dapat disimpulkan sebagai praktik di mana aktor politik menggunakan sumber daya seperti uang, barang, atau layanan untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat, dengan tujuan memenangkan pemilihan. Dalam konteks teori pilihan rasional, *money politics* adalah interaksi strategis antara masyarakat sebagai pemilih dan calon kepala negara, di mana uang dan jabatan politik menjadi alat utama yang digunakan untuk mencapai tujuan masing-masing. Praktik ini tidak hanya melibatkan transaksi langsung antara kandidat dan pemilih, tetapi juga berbagai bentuk kompensasi lain yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk mendapatkan dukungan politik, dan sering kali dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan.

Politik uang atau *money politics* merupakan bentuk korupsi yang terjadi dalam pemilihan umum, Daniel Dumke dalam bukunya berpendapat bahwa, sejauh ini *money politics* tidak dapat didefinisikan dengan jelas atau masih belum mendapat gambaran tentang bagaimana *money politics* itu didefinisikan (Huda *et al.* 2022).

Terdapat 3 (tiga) bentuk *money politics* yang umumnya terjadi di Indonesia, *pertama* yaitu *money politics* pada kalangan atas yaitu transaksi antara elit ekonomi/pemilik modal, dengan itu kandidat menjanjikan ketika terpilih elit ekonomi/pemilik modal tersebut mendapatkan kebijakan yang dapat menguntungkan para elit tersebut. Pemilik modal dapat mendikte kebaikan partai atau kandidat ketika telah memenangkan pemilihan. Bentuk ini memiliki dampak yang sangat strategis dalam kehidupan politik, karena pemilik modal dapat mempengaruhi kebijakan partai atau calon yang menang. Hal ini terjadi karena keterbatasan dana yang dimiliki anggota partai, sehingga mereka sering kali mengambil jalan pintas dengan menerima dana dari elit politik, kantong pribadi calon, atau bahkan menggunakan uang negara secara tidak sah. *Kedua*, *money politics* di tingkat menengah, yang melibatkan transaksi antara elit politik, seperti calon potensial, dengan elit partai dalam bentuk pembayaran kepada elit partai untuk mendapatkan posisi sebagai calon atau menentukan nomor urut calon. *Ketiga*, *money politics* di tingkat bawah yang melibatkan transaksi antara elit politik atau calon dengan massa pemilih (Sacipto 2019).

Munculnya *money politics* dalam pemilu dikarenakan adanya akibat dari politik praktis yang berorientasi kekayaan dan kekuasaan, yang efeknya terjadi korupsi pada partai politik. Ketika pemilu berlangsung, baik itu dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan legislatif, *money politics* seakan menjadi bagian yang sulit dihindari. Sebagian besar calon yang didukung oleh partai politik harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk kampanye, yang berakibat pada saat pemilihan berlangsung mereka menghalalkan segala cara

agar biaya kampanye yang sudah mereka keluarkan dapat kembali, salah satu caranya adalah dengan menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya praktik *money politics*, yang dapat di identifikasikan dari kejadian dan fakta di lapangan masyarakat Indonesia (Sacipto 2019).

Politik uang sangat marak di Indonesia dan sudah menjadi suatu budaya disetiap menjelang pemilihan, baik pemilu maupun pilkada. Masyarakat menganggap bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh kandidat adalah satu hal yang biasa, karena praktik politik uang ini sudah sering dilakukan di setiap waktu menjelang pemilihan, hingga presentase politik uang terus meningkat hingga di masa sekarang ini (Kurniawan and Hermawan 2019).

Menurut Aspinall & Sukmajati (2015) dalam (Stange 2017), jenis-jenis *money politics* dalam pemilihan umum yang terjadi di Indonesia meliputi:

1. Jual Beli Suara

Ini adalah bentuk paling umum dari *money politics*, di mana pemilih diberikan uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilu.

2. Pemberian Sumbangan

Pemberian sumbanga diberikan kepada individua tau kelompok sebagai imbalan untuk dukungan politik. Ini bisa berupa uang tunai, barang, atau layanan.

3. Penggunaan Fasilitas Negara

Pemanfaatan sumber daya atau fasilitas negara untuk keuntungan pribadi, seperti proyek infrastruktur yang dibiayai oleh anggaran negara tetapi digunakan untuk kepentingan kampanye.

4. Mahar Politik

Mahar politik merupakan biaya yang harus dibayarkan untuk mendapatkan tiket pencalonan dalam pemilihan. Ini sering kali melibatkan pembayaran kepada partai politik.

5. Pemberian Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial atau program kesejahteraan yang dilakukan menjelang pemilu dengan tujuan untuk menarik dukungan dari pemilih.

6. Suap Kepada Penyelenggara Pemilu

Praktik memberikan uang atau barang kepada penyelenggara pemilu untuk mempengaruhi proses pemilihan atau hasil pemilu.

Praktik *money politics* dalam pemilu dapat dilihat melalui perspektif teori pilihan rasional. Salah satu tokoh terkemuka dalam teori ini adalah James S. Coleman. Coleman (2007) dalam (Syafira and Harianto 2020) berpendapat bahwa setiap tindakan seseorang didorong oleh tujuan-tujuan dan nilai yang mereka inginkan. Dalam teori pilihan rasional terdapat dua unsur utama yang terlibat, yaitu aktor dan sumber daya. Uang menjadi salah satu motivasi penting bagi individu untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam konteks pemilihan presiden, aktor yang

dimaksud adalah masyarakat dan calon kepala negara, sedangkan sumber daya yang dimaksud meliputi uang dan jabatan politik. Coleman menggambarkan adanya interaksi antara aktor dan sumber daya, di mana masing-masing aktor memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber daya tersebut. Baik masyarakat maupun calon kepala daerah memiliki kendali atas jabatan politik. Masyarakat memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan terpilih, sementara calon memiliki kapasitas untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Interaksi ini menunjukkan bagaimana kedua aktor saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan masing-masing.

Menggunakan teori rasional ini kita dapat melihat bahwa fenomena politik uang terjadi karena adanya tujuan dan nilai yang diinginkan oleh aktor politik dan masyarakat. Aktor politik, seperti calon kepala daerah atau anggota legislatif, menggunakan uang sebagai alat untuk mencapai tujuan politik mereka, yaitu memenangkan pemilihan. Di sisi lain, masyarakat yang terlibat dalam politik uang juga didorong oleh nilai-nilai yang mereka inginkan, seperti keuntungan finansial atau material jangka pendek. Interaksi antara aktor politik dan masyarakat dalam konteks politik uang mencerminkan dinamika di mana kedua pihak saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan masing-masing.

Dalam konteks pemilih pemula, *money politics* memiliki relevansi yang signifikan. Pemilih pemula, yang cenderung kurang berpengalaman dan lebih rentan terhadap pengaruh eksternal, sering menjadi target praktik politik uang. Faktor-faktor seperti ketidaktahuan, kurangnya pendidikan politik, dan tekanan sosial dapat membuat pemilih pemula lebih mudah dipengaruhi oleh iming-iming

materi. Praktik ini tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi generasi muda dalam memahami dan menghargai pentingnya partisipasi politik yang jujur dan bebas dari korupsi.

2.3 Sosialisasi Politik Keluarga

Sosialisasi politik adalah bentuk pembelajaran politik di mana individu mengembangkan sikap, nilai, keyakinan, opini, dan perilaku yang mendukung peran mereka sebagai warga negara yang baik. Proses ini umumnya berlangsung satu arah, di mana kaum muda memahami dunia politik melalui interaksi dengan orang dewasa dan media. Pemahaman ini berkembang dalam sebuah model yang menunjukkan bagaimana pengaruh eksternal membantu membentuk pandangan politik generasi berikutnya (Greenstein 1965).

Agen-agen sosialisasi seperti orang tua, guru, dan media massa menyampaikan orientasi politik kepada individu yang umumnya bersifat pasif. Sebagai contoh, orang tua yang aktif dalam kegiatan politik dan secara konsisten berpartisipasi dalam pemilu sering kali mempengaruhi anak-anak mereka untuk mengikuti kebiasaan tersebut. Anak muda yang melihat liputan televisi tentang teman sebaya yang menjadi sukarelawan di komunitas mungkin terinspirasi untuk terlibat dalam kegiatan serupa. Situasi yang memungkinkan sosialisasi politik terjadi sangat beragam. Anak muda dapat memperoleh pemahaman politik melalui obrolan keluarga saat makan malam, menonton televisi dan film, ikut serta dalam grup Facebook, atau berkomunikasi dengan teman. Efek dari pengalaman-

pengalaman ini pun sangat bervariasi, karena individu dapat memilih untuk menerima, menolak, atau mengabaikan pesan-pesan politik yang disampaikan

Latar belakang keluarga, yang mencakup aspek status sosial, ekonomi, Pendidikan, dan agama, memainkan peran penting dalam bentuk partisipasi politik pemilih pemula (Martani 2022). Dalam penelitian ini, latar belakang keluarga dianalisis untuk memahami bagaimana faktor faktor tersebut memengaruhi partisipasi pemilih pemula di kalangan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan menghubungkan konsep intervensi sosial dan latar belakang keluarga, dapat dilihat bahwa sosialisasi politik yang terjadi dalam keluarga dapat menjadi mekanisme penting dalam mempengaruhi dan menentukan preferensi politik generasi muda.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosialisasi adalah proses pembelajaran yang dialami seseorang untuk memahami dan menginternalisasi kebudayaan masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, sosialisasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menyampaikan nilai-nilai atau budaya kepada masyarakat dalam lingkungan mereka.

Dalam bukunya Ramlan Surbakti berpendapat bahwa sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Dengan proses sosialisasi politik ini anggota masyarakat memiliki sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses sosialisasi politik ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh baik secara sengaja melalui Pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak

disengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat (Surbakti 2010).

Menurut Gabriel A. Almond, sosialisasi politik memperlihatkan proses pembentukan sikap dan tingkah laku politik juga sebagai sarana suatu generasi untuk mewariskan patokan dan keyakinan politik kepada generasi berikutnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Alfian, dengan melalui proses sosialisasi politik anggota masyarakat bisa mengenal, memahami, dan menghayati nilai politik tertentu, yang memengaruhi sikap dan tingkah laku politik mereka sehari-hari (Haryanto 2018).

Rafael Raga Maran dalam bukunya menjelaskan bahwa sosialisasi politik adalah sebagai proses di mana individu belajar dan menginternalisasi nilai-nilai, sikap, dan perilaku politik yang ada dalam masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai agen sosialisasi, seperti keluarga, sekolah, media, dan kelompok sebaya, yang berperan dalam membentuk orientasi politik individu (Maran 2001).

Menurut Mary G. Kweit dan Robert W. Kweit, sosialisasi politik adalah proses di mana individu mempelajari tentang politik hingga akhirnya membentuk orientasi politik tertentu yang bertujuan untuk mencapai stabilitas dalam sistem politik. Oleh karena itu, proses sosialisasi politik bertujuan untuk mengembangkan orientasi politik yang mendukung terciptanya stabilitas politik (Kweit and Kweit 1986).

Dengan demikian, sosialisasi politik merupakan proses yang dinamis dan terus berlangsung sepanjang hidup seseorang, di mana individu dipengaruhi oleh

berbagai lingkungan sosial dalam memahami dan membentuk pandangan politik mereka. Proses ini tidak hanya penting dalam pembentukan identitas politik, tetapi juga dalam pemeliharaan stabilitas politik dalam masyarakat, karena melalui sosialisasi, nilai-nilai politik dapat diwariskan dan dilestarikan antar-generasi.

Sama seperti konsep sosialisasi secara umum, sosialisasi politik mencakup dua aspek utama yaitu adanya proses dan tujuan. Proses ini melibatkan transfer nilai-nilai, pengetahuan, keyakinan, sikap, dan harapan politik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sementara itu, tujuan dari sosialisasi politik adalah untuk memastikan individu dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan politik masyarakat, dengan memahami dan menghayati aspek-aspek politik yang relevan (Damsar 2010).

Dalam sosialisasi politik, terdapat sejumlah agen yang dianggap memiliki peran penting, di antaranya keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, dan media massa. Agen-agen ini berperan dalam membentuk pengetahuan, sikap, nilai, norma, perilaku, serta harapan yang berkaitan dengan politik.

Menurut Damsar (Damsar 2010), agen sosialisasi politik terdiri dari beberapa elemen penting yang berperan dalam proses sosialisasi politik individu. Berikut adalah agen-agen sosialisasi politik yang disebutkan:

1. Keluarga

Keluarga adalah agen sosialisasi politik yang paling awal dan berpengaruh. Dalam konteks ini, keluarga berperan dalam menanamkan

nilai-nilai politik dan sikap kepada anak-anak, yang akan membentuk pandangan politik mereka di masa depan.

2. Sekolah

Sekolah berfungsi sebagai agen sosialisasi formal yang mengajarkan pengetahuan politik melalui kurikulum Pendidikan. Di sekolah, siswa belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta cara berpartisipasi dalam proses politik.

3. Teman Sebaya (Peer Group)

Kelompok teman sebaya dapat mempengaruhi pandangan politik individu, terutama pada masa remaja. Diskusi dan interaksi dalam kelompok ini sering kali membentuk sikap dan orientasi politik.

4. Media Massa

Media, baik cetak maupun elektronik, berperan penting dalam menyebarkan informasi politik dan membentuk opini publik. Media dapat mempengaruhi cara individu memahami isu-isu politik dan menanggapi peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Damsar menekankan bahwa agen-agen sosialisasi politik ini berkontribusi dalam membentuk orientasi politik individu dan membantu mereka memahami serta berpartisipasi dalam kehidupan politik secara lebih efektif. Proses sosialisasi politik berlangsung sepanjang hayat dan melibatkan interaksi dengan berbagai agen yang berbeda (Damsar 2010).

Keluarga sering kali menjadi agen pertama yang memperkenalkan nilai-nilai dan pandangan politik kepada individu sejak usia dini. Orang tua, misalnya, tidak hanya menanamkan nilai-nilai politik yang mereka anut, tetapi juga sering kali secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pilihan politik anak-anak mereka. Melalui percakapan sehari-hari, contoh perilaku, dan bahkan melalui keputusan politik seperti afiliasi partai, keluarga membentuk dasar bagi sikap politik individu. Sosialisasi politik keluarga ini dapat mencakup pengenalan terhadap isu-isu politik tertentu, pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik, serta pembentukan sikap terhadap otoritas dan kekuasaan.

Keluarga memiliki peran sebagai agen sosialisasi politik yang signifikan dalam membentuk pandangan dan perilaku politik individu. Keluarga sebagai agen sosialisasi politik memiliki peran sebagai berikut:

1. Transmisi Nilai dan Sikap Politik

Keluarga berfungsi sebagai tempat pertama di mana individu mendapatkan nilai-nilai dan sikap politik. Melalui interaksi sehari-hari, anak-anak belajar tentang pandangan politik orang tua mereka, yang sering kali menjadi dasar bagi orientasi politik mereka di masa depan. Proses ini mencakup diskusi tentang isu-isu politik yang ditunjukkan oleh orang tua (Winarni 2005).

2. Sosialisasi Melalui Pengalaman

Keluarga memberikan pengalaman langsung yang dapat mempengaruhi sikap politik individu. Misalnya ketika anggota keluarga terlibat dalam kegiatan politik, seperti kampanye atau demonstrasi, anak-anak yang

mengetahui/menyaksikan atau ikut serta dalam kegiatan tersebut cenderung mengadopsi sikap yang lebih aktif terhadap partisipasi politik. Pengalaman ini membentuk pemahaman mereka tentang pentingnya keterlibatan dalam proses politik (Haryanto 2018).

3. Dukungan dan Tekanan Keluarga

Dukungan keluarga dapat memotivasi anggota untuk terlibat dalam kegiatan politik, seperti memberikan suara atau berpartisipasi dalam kampanye tertentu, sementara tekanan keluarga dapat mendorong mereka untuk mendukung kandidat atau partai tertentu sesuai dengan preferensi keluarga tersebut (M. V. Esau and Roman 2015).

Selain itu, keluarga juga berfungsi sebagai penyalur utama dalam mentransmisikan nilai-nilai politik lintas generasi, memastikan kontinuitas ideologi dan praktik politik dalam keluarga tersebut. Dalam banyak kasus, pandangan politik yang dianut oleh orang tua dapat mempengaruhi anak-anak mereka hingga dewasa, yang kemudian meneruskan nilai-nilai tersebut kepada generasi berikutnya. Namun, sosialisasi politik keluarga juga bisa menjadi sumber konflik apabila terdapat perbedaan pandangan politik antara anggota keluarga, yang bisa memicu pergeseran atau perubahan dalam sikap politik individu. Dengan demikian, keluarga bukan hanya agen sosialisasi politik yang efektif, tetapi juga arena di mana dinamika politik dan nilai-nilai terus diuji dan dikembangkan.

2.4 Partisipasi Politik

Partisipasi politik, menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip di definisikan sebagai keterlibatan individu tau kelompok dalam proses politik yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Mereka menekankan bahwa partisipasi politik mencakup berbagai bentuk aktivitas, mulai dari memberikan suara dalam pemilihan umum, mengikuti diskusi politik, dan berpartisipasi dalam demokrasi (Setiadi and Kolip 2013).

Partisipasi politik merupakan konsep yang sangat populer dalam ilmu politik. Namun, penggunaannya yang beragam menyebabkan adanya berbagai definisi. Meskipun demikian, kebanyakan ahli ilmu politik sepakat bahwa partisipasi politik merujuk pada keterlibatan masyarakat atau rakyat dalam kegiatan kegiatan politik dengan tujuan memengaruhi kebijakan pemerintah. keterlibatan ini terbagi menjadi dua jenis: pertama, kegiatan politik yang bersifat mengajukan gugatan atau tuntutan terhadap sistem politik atau pemerintah, dan kedua adalah kegiatan politik yang mendukung gagasan dan kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik atau pemerintah (Pito *et al.* 2022). Adapun pengertian tentang partisipasi politik menurut para ahli, berikut beberapa diantaranya:

1. Menurut Keith Fauls, partisipasi politik adalah sebagai keterlibatan aktif individu dalam kegiatan pemerintahan, yang mencakup mempengaruhi kebijakan public dan menentukan keputusan politik (Faulks and Mahadi 2021).

2. Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik merupakan aktivitas sukarela yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan pemimpin, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dalam proses pembentukan kebijakan publik (Budiardjo 2003).
3. Menurut Kevin R. Hardwick, partisipasi politik merujuk pada berbagai cara di mana warga negara berinteraksi dengan pemerintah, di mana mereka berusaha untuk mengkomunikasikan kepentingan mereka kepada pejabat publik dengan harapan agar kepentingan tersebut dapat diwujudkan (*Pito et al.* 2022).
4. Menurut Tommi Legowo partisipasi politik didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang berhubungan langsung dengan kebijakan-kebijakan sistem politik atau pemerintah. Partisipasi ini dapat terjadi baik secara individu maupun kelompok, dan bisa bersifat spontan maupun dimobilisasi, baik dalam bentuk yang legal maupun ilegal (Sitepu 2012).

Dalam konteks ini, partisipasi politik memegang peran vital dalam memastikan bahwa demokrasi berfungsi secara efektif, dengan kekuasaan yang selalu berorientasi pada kepentingan publik. Partisipasi politik warga merupakan inti dari sistem demokrasi, dan tanpa adanya keterlibatan aktif dari masyarakat, suatu negara tidak dapat disebut sebagai negara demokratis yang matang. Jika negara membatasi akses dan keterlibatan warganya dalam proses pengambilan keputusan, maka dapat dikatakan bahwa demokrasi di negara tersebut belum

berkembang dengan baik. Kebebasan rakyat untuk berpartisipasi dalam politik adalah indikator kunci untuk menilai sejauh mana demokrasi berfungsi dalam sebuah negara. Tanpa partisipasi politik yang bebas dan terbuka, prinsip-prinsip demokrasi tidak dapat dijalankan secara optimal, karena partisipasi itu sendiri adalah esensi dari keberadaan demokrasi. Oleh karena itu, adanya kesempatan bagi rakyat untuk terlibat dalam proses politik adalah ukuran fundamental untuk mengukur eksistensi dan kualitas demokrasi dalam suatu negara.

Demokrasi sebagai sistem politik bertujuan untuk menyediakan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem demokratis yang sehat, rakyat diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam berbagai aspek politik, termasuk pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Namun, dalam kekuasaan yang bersifat otoriter, fasis, atau anti-demokrasi, partisipasi politik seringkali ditekan atau diabaikan. Dalam sistem semacam itu, kekuasaan sering kali dipusatkan di tangan para elit politik, sementara rakyat umum dipaksa untuk menjadi apatis. Apatisme ini, yang merupakan hasil dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik tertentu, menandakan kegagalan sistem untuk mendorong partisipasi aktif. Sebagai contoh, pada era Orde Baru di Indonesia, berbagai regulasi diciptakan untuk mengekang partisipasi politik rakyat. Kebebasan untuk berekspresi dan berorganisasi dibatasi secara ketat, dan perbedaan pendapat, kritik, serta protes massa sering kali dikendalikan melalui teror, kekerasan, dan bentuk-bentuk represi lainnya. Akibatnya, rakyat tidak hanya kehilangan kebebasan untuk berpartisipasi

dalam politik, tetapi juga menjadi subjek yang terabaikan dalam menentukan arah masa depan masyarakatnya.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi politik merujuk pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara (private citizen) dalam kapasitas pribadi dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Bentuk partisipasi ini dapat bervariasi, baik dilakukan secara individu maupun kolektif, terstruktur atau spontan, melalui cara-cara damai atau kekerasan, serta dapat bersifat legal maupun illegal (Huntington 1994).

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan pembuatan keputusan hingga penilaian terhadap keputusan tersebut. Partisipasi ini mencakup juga kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan keputusan yang telah diambil. Lebih dari itu, partisipasi politik melibatkan aktivitas individu atau kelompok dalam kehidupan politik, baik melalui tindakan memilih pemimpin secara langsung maupun dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara tidak langsung. Dengan kata lain, partisipasi politik tidak hanya sebatas pemilihan umum, tetapi juga mencakup berbagai bentuk partisipasi yang memungkinkan warga untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka dan masyarakat luas. Keterlibatan ini adalah salah satu elemen kunci dalam demokrasi yang memungkinkan warga untuk berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai kepentingan mereka.

Dalam konteks pengaruh *money politics* dan sosialisasi politik keluarga terhadap partisipasi politik pemilih pemula, penting untuk menganalisis bagaimana praktik politik uang dan sosialisasi politik keluarga dapat mempengaruhi keterlibatan pemilih pemula dalam proses politik. *Money politics*, sebagai bentuk manipulasi politik yang melibatkan pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih, dan sosialisasi politik keluarga, yang dapat mengubah preferensi politik pemilih pemula, dapat merusak kualitas partisipasi politik.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis selama proses penelitian agar penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam penelitian dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Penulis mengacu pada berbagai bahan penelitian, yang memperkaya proses penelitian penulis. Berikut ini adalah jenis-jenis penelitian terdahulu yang digunakan penulis untuk penelitiannya:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No .	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Inti Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan	Murtadha Zaiton dan, Ubaidillah, M.A.	Metode Pendekatan Kuantitatif	Penelitian ini menggunakan teori partisipasi pemilih. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh <i>money politic</i> terhadap partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini dibuktikan dengan	Penelitian oleh Murtadha Zaiton dan Ubaidillah fokus pada pengaruh <i>money politic</i> terhadap partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Aceh Selatan, menggunakan pendekatan

				hasil uji korelasi yang menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,771, serta hasil uji hipotesis yang menunjukkan thitung lebih besar dari ttabel ($10,757 > 1,990$) pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, uji regresi linier juga mengindikasikan adanya pengaruh positif antara money politic dan partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018, dengan hasil Fhitung lebih besar dari Ftabel ($115,714 > 3,96$). Ini berarti hipotesis alternatif diterima, menegaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel X (Money Politic) dan variabel Y (partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2018 di Kabupaten Aceh Selatan).	kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji pengaruh <i>money politics</i> tetapi juga sosialisasi politik keluarga, sehingga memiliki cakupan variabel yang lebih luas dan konteks yang lebih baru dalam Pemilu 2024.
2.	Melampaui Politik Uang Studi Kasus Peningkatan Partisipasi Politik Dalam Pilwalko Medan Tahun 2020	Rafif Pamenang Imawan dan Dimas Ramadhan	Metode Pendekatan Kuantitatif	Penelitian tersebut membahas bagaimana hubungan antara faktor polarisasi politik, politik uang, dan kepercayaan terhadap lembaga penyelenggaraan pemilu terhadap meningkatnya angka partisipasi pilwako kota Medan tahun 2020. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa <i>money politics</i> tidak	Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus variabel dan populasi yang diteliti: penelitian oleh Rafif dan Dimas mengeksplorasi efek dari beberapa faktor umum dalam konteks pemilihan umum kota, sementara penelitian kedua secara spesifik mengevaluasi pengaruh <i>money</i>

				memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih. Pengaruh paling kuat justru ada pada kepercayaan terhadap Bawaslu, preferensi pemilih, dan usia.	<i>politics</i> dan sosialisasi politik keluarga terhadap pemilih pemula di lingkungan sekolah.
3.	Pengaruh Keluarga Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Kelurahan Bugel Kabupaten Kulon Progo	Sukmawati Martani dan, Suharno	Metode Pendekatan Kuantitatif	Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh latar belakang keluarga dan sosialisasi politik dalam keluarga terhadap partisipasi politik pemilih pemula di Kalurahan Bugel. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami seberapa besar pengaruh latar belakang keluarga dan sosialisasi politik terhadap tingkat partisipasi politik pemilih pemula, serta hubungan antara kedua faktor tersebut dengan partisipasi politik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk menganalisis data dan menggambarkan hubungan yang ada antara variabel-variabel tersebut.	Penelitian Sukmawati Martani dan Suharno di Kalurahan Bugel berfokus pada pengaruh latar belakang keluarga dan sosialisasi politik dalam keluarga terhadap partisipasi politik pemilih pemula, menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk memahami hubungan antara kedua faktor tersebut dengan partisipasi politik. Sementara itu, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas dengan menggabungkan variabel <i>money</i> <i>politics</i> dan sosialisasi politik keluarga, serta berfokus pada Pemilu 2024, sehingga memperluas analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula.
4.	Pengaruh Keluarga, Tokoh Agama dan Teman terhadap	Meike Kurniawati	Metode Pendekatan Kuantitatif	Penelitian ini berfokus pada pemilih pemula dalam Pemilihan Umum Indonesia 14 Februari 2024, yang	Penelitian Meike Kurniawati meneliti pengaruh keluarga, tokoh agama, dan teman terhadap perilaku

	Perilaku para Pemilih Pemula			diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Pemilih pemula, yang umumnya merupakan generasi muda dari millennial dan Z, menjadi target utama partai politik karena jumlahnya yang besar dan peran mereka sebagai penentu masa depan. Karena seringkali belum memiliki pendidikan politik yang memadai dan belum memutuskan pilihan, mereka cenderung mencari informasi dari kelompok referensi seperti keluarga, tokoh agama, dan teman. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh keluarga, tokoh agama, dan teman terhadap perilaku memilih pemula dengan menggunakan metode kuantitatif.	pemilih pemula dalam Pemilu 2024, dengan fokus pada generasi muda dari millennial dan Gen Z sebagai kelompok yang sering belum memiliki pendidikan politik yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk memahami bagaimana kelompok referensi ini mempengaruhi keputusan memilih. Sementara itu, penelitian ini lebih terfokus pada dua variabel spesifik, yaitu <i>money</i> dan sosialisasi politik keluarga, dalam konteks partisipasi politik pemilih pemula di sebuah sekolah, mempersempit ruang lingkup studi namun memperdalam analisis pada dua faktor utama tersebut.
5.	Pengaruh Keluarga, Peer Group dan Media Massa Terhadap Perilaku Memilih Mahasiswa FISIP UNDIP Pada Pemilu Presiden 2014	Andi Teguh Wicaksono	Metode Pendekatan Kuantitatif	Dengan analisis deskriptif terhadap frekuensi jawaban responden mengenai pengaruh keluarga menunjukkan, sebanyak 28 orang atau 29,8% menyebutkan bahwa keluarga kurang mempengaruhi pilihan mereka, dan 7 orang atau 7,4% merasa bahwa	Secara keseluruhan, perbedaan utama terletak pada ruang lingkup penelitian dan pendekatannya: penelitian yang dilakukan oleh Andi Teguh Wicaksono lebih berfokus pada pengaruh keluarga

				keluarga sangat tidak mempengaruhi pilihan mereka. Sebaran jawaban ini hampir merata dan tidak ada yang mencapai 50%, menunjukkan bahwa keluarga tidak sepenuhnya mempengaruhi kehidupan pribadi seseorang. Pilihan dalam Pemilu tetap merupakan hak pribadi dan rahasia setiap individu. Meskipun intensitas komunikasi yang tinggi dengan orang tua, kedekatan antar anggota keluarga, dan pandangan orang tua terhadap Pilpres 2014 ada, hal ini tidak secara mutlak mempengaruhi pilihan responden dalam Pilpres 2014.	secara deskriptif, sedangkan penelitian kedua menganalisis pengaruh <i>money politics</i> dan <i>sosialisasi politik</i> keluarga dalam konteks partisipasi politik pemilih pemula melalui pendekatan yang lebih empiris.
6.	Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih Pemilukada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018	Hardianto Hawing, Besse Nurul Fadillah, dan Hafiz Elfiansya Parawu	Metode Penelitian Kuantitatif	Penelitian ini menganalisis pengaruh politik uang terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Wajo 2018 menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa politik uang secara simultan berkontribusi sebesar 53% terhadap partisipasi politik, dengan pemberian barang (52%) dan uang (46%) memiliki pengaruh signifikan secara parsial, sementara pemberian janji	Perbedaan utama terletak pada fokus variabel penelitian, metode pendekatan, serta ruang lingkup objek. Penelitian Pilkada Wajo lebih terfokus pada aspek pragmatis politik uang di wilayah besar, sementara penelitian Sindangkasih menggabungkan faktor transaksional dan sosialisasi dalam konteks yang lebih spesifik pada siswa SMA.

				hanya memengaruhi 6%. Indikator partisipasi politik meliputi pemberian suara, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai, dan menjalin kontak dengan pemerintah, yang semuanya cukup berpengaruh.	
7.	Politik Uang dan Partisipasi Politik pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Banjar	Teguh Anggoro, Tina Cahya Mulyatin, Nova Chalimah Girsang, Riza Purnama, dan Tofan Ibrahim	Metode Penelitian Kuantitatif	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politik uang terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kota Banjar, Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik Proportionate Stratified Sampling, melibatkan 399 responden dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang hanya berkontribusi sebesar 4,4% terhadap partisipasi politik, sementara 95,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Partisipasi politik masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosiologis (80,5%), seperti kesamaan identitas dan kedekatan sosial, serta faktor lain seperti kewajiban (56,1%) dan visi-misi calon (50,9%). Temuan ini menegaskan bahwa meskipun politik	Penelitian di Kota Banjar lebih terfokus pada pengaruh politik uang di kalangan masyarakat umum, sedangkan penelitian di Sindangkasih melihat kombinasi pengaruh politik uang dan sosialisasi politik keluarga terhadap pemilih pemula. Perbedaan utama terletak pada objek penelitian, teori yang digunakan, dan hasil yang diperoleh dari kedua studi tersebut. Penelitian di Kota Banjar lebih mengarah pada faktor sosiologis dan politik uang, sedangkan penelitian di Sindangkasih mengkombinasikan teori rasionalitas dalam pengambilan keputusan politik dengan pengaruh sosialisasi politik keluarga.

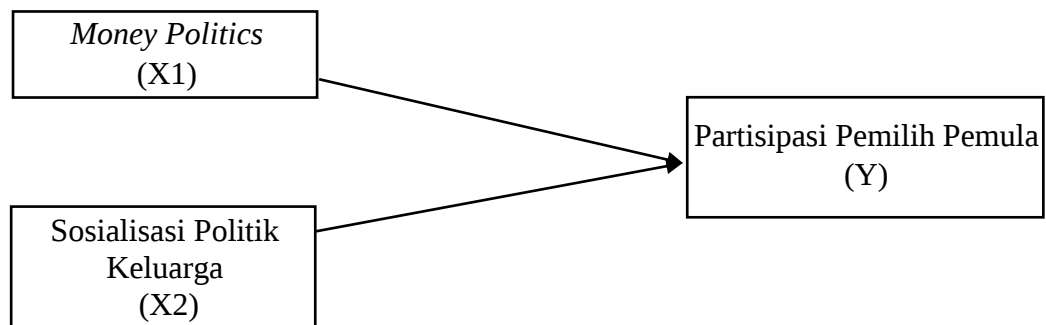
				uang sering dilakukan oleh kandidat, praktik tersebut tidak secara signifikan memengaruhi keputusan masyarakat untuk memilih, karena uang atau barang yang diberikan cenderung diterima tanpa jaminan dukungan politik.	
8.	Pengaruh Politik Uang Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharma Raya pada Pilkada Serentak 2015	Mery Anggraini (2019)	Metode Penelitian Kuantitatif	Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2015, praktik <i>money politics</i> masih menjadi salah satu faktor yang menarik minat masyarakat Kabupaten Dharma Raya untuk berpartisipasi. Hubungan antara politik uang dengan tingkat partisipasi politik bersifat positif tetapi lemah. Menariknya, pengaruh politik uang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, tetapi juga oleh kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang memiliki dampak pada seluruh lapisan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Dharma Raya.	Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada obyek penelitian, yaitu masyarakat umum dengan pemilih pemula, serta variabel yang dianalisis. Penelitian di Kabupaten Dharma Raya lebih menekankan pada pengaruh <i>money politics</i> secara langsung terhadap partisipasi politik masyarakat dengan berbagai tingkat kesejahteraan, sementara penelitian di SMA Negeri 1 Sindangkasih menggabungkan pengaruh <i>money politics</i> dan sosialisasi politik keluarga untuk mempelajari bagaimana kedua faktor tersebut memengaruhi partisipasi politik pemilih pemula.
9.	Pengaruh <i>Money Politics</i> Terhadap	Revi Kazali, Dr. Endang,	Metode Penelitian Kuantitatif	Dari data yang dianalisis pengaruhnya <i>money</i>	Perbedaan dengan penelitian ini terletak dari objek

	Pilihan Masyarakat Pada Pilkades Serentak di Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang)	dan Nico O. Adysyas (2020)		<i>politics</i> terhadap pilihan masyarakat Desa Teluk Limau sangatlah besar pengaruhnya. Terlihat dari hasil data yang ditemukan dari seluruh jawaban responden masyarakat Desa Teluk Limau yang diambil terdapat 73% responden yang menerima <i>money politics</i> .	penelitian, periode pemilu dan teori yang digunakan.
--	--	----------------------------	--	--	--

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini bertujuan untuk menguraikan sistematika dan alur logis dalam mengkaji dampak *money politics* dan sosialisasi politik keluarga terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di SMA Negeri 1 Sindangkasih. Penelitian ini memfokuskan pada dua variabel utama: *money politics* dan sosialisasi politik keluarga. *Money politics*, yang mencakup berbagai bentuk praktik politik uang, yang mempengaruhi keputusan dan partisipasi pemilih pemula, sedangkan sosialisasi politik keluarga mencakup pengaruh orang tua atau keluarga dalam proses sosialisasi politik. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana kedua faktor tersebut memengaruhi tingkat keterlibatan politik pemilih pemula, dengan harapan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik di kalangan generasi muda pada pemilihan mendatang.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Kerangka pemikiran ini didasarkan pada penggunaan dua pendekatan utama dalam perilaku pemilih, yaitu pendekatan rasional dan pendekatan sosiologis. Tujuannya adalah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula. Pendekatan rasional fokus pada bagaimana pemilih membuat keputusan berdasarkan logis, yang dalam penelitian ini diukur melalui pengaruh *money politics*. Sementara itu, pendekatan sosiologis menyoroti pengaruh sosial, khususnya dari keluarga, yang diukur melalui sosialisasi politik keluarga.

2.7 Hipotesis

Berdasarkan pemahaman dan analisis teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, hipotesis-hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara *money politics* dan sosialisasi politik keluarga terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di SMA Negeri 1 Sindangkasih.

H₂ : Praktik *money politics* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik pemilih pemula di SMA Negeri 1 Sindangkasih. Ini berarti bahwa semakin besar intensitas *money politics*, semakin tinggi tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu.

H₃ : Sosialisasi Politik keluarga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik pemilih pemula di SMA Negeri 1 Sindangkasih. Dengan kata lain, semakin kuat pengaruh keluarga, semakin besar kemungkinan pemilih pemula akan terlibat aktif dalam proses politik.

Hipotesis ini difokuskan pada pengujian bagaimana kedua variabel tersebut, *money politics* dan sosialisasi politik keluarga berkontribusi terhadap peningkatan atau penurunan partisipasi politik di kalangan pemilih pemula, khususnya di lingkungan SMA Negeri 1 Sindangkasih.

Hipotesis penelitian ini dirumuskan untuk menguji pengaruh kedua faktor tersebut terhadap partisipasi politik pemilih pemula di SMA Negeri 1 Sindangkasih. Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara *money politics* dan sosialisasi politik keluarga terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di SMA Negeri 1 Sindangkasih. Hipotesis (H2) menyatakan bahwa praktik *money politics* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik pemilih pemula, yang mencerminkan bagaimana keputusan politik dapat dipengaruhi oleh insentif material. Hipotesis kedua (H3) berfokus pada pendekatan sosiologis,

dengan asumsi bahwa sosialisasi politik keluarga, sebagai faktor sosial yang kuat, juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik pemilih pemula. Kedua hipotesis ini memberikan dasar untuk menguji bagaimana faktor-faktor rasional dan agen sosial berinteraksi dan memengaruhi perilaku politik pemilih pemula dalam pemilihan umum 2024.